

## KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN REPUBLIK INDONESIA

Jl. M.H. Thamrin No. 8, Jakarta 10340 - INDONESIA Telp.+62 21 23951100, Email: kemenkomaritim@maritim.go.id

16 Desember 2018

Nomor: B-1345/SESMENKO/MARITIM/UM206/XII/2018

Sifat : Segera

Hal : Undangan Rapat Koordinasi

Yth. Daftar Undangan Terlampir

di

Tempat

Dalam rangka menindaklanjuti Rapat Kabinet terbatas di Istana yang membahas tentang Pengembangan Badan Pengusahaan (BP) Batam sebagai solusi atas dualisme kepemimpinan di Batam, dengan hormat kami mengundang kehadirannya dalam rapat koordinasi yang akan diselenggarakan pada:

hari, tanggal : Selasa, 18 Desember 2018

pukul : 09.00-selesai

tempat : Ruang Rapat Lantai 2 Selatan

Gedung Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman,

Jalan M.H. Thamrin No. 8, Jakarta

agenda : 1. Pengaturan pengelolaan Kawasan Perdagangan Bebas

dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) Batam oleh BP Batam

2. Pembahasan dan penyiapan aturan mengenai pelaksanaan rangkap jabatan Kepala BP Batam secara

ex-officio oleh Walikota Batam

pimpinan rapat : Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman.

Mengingat pentingnya agenda tersebut, kami mohon kesediaannya untuk dapat hadir tepat waktu. Informasi dan konfirmasi kehadiran dapat menghubungi Sdr. Rachmat Nur Samudra (+6285146011008).

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kehadirannya, kami mengucapkan

terima kasih.

Agus Purwoto

Sekretaris Kementerian Koordinator,

## Tembusan:

- 1. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman
- 2. Sekretaris Kabinet
- 3. Menteri Perhubungan
- 4. Menteri Kelautan dan Perikanan
- 5. Menteri Keuangan
- 6. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
- 7. Panglima TNI
- 8. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia

## Lampiran

Nomor: B-1345/SESMENKO/MARITIM/UM206/XII/2018

Tanggal: 16 Desember 2018

## **DAFTAR UNDANGAN**

1. Deputi Bidang Kemaritiman, Sekretariat Kabinet;

- 2. Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan;
- 3. Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan;
- 4. Direktur Jenderal Imigrasi, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- 5. Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan;
- 6. Kepala Badan Pengusahaan (BP) Batam;
- 7. Bapak Laksamana TNI (Purn) Dr. Marsetio, Tenaga Ahli Menteri Bidang Pertahanan dan Keamanan Maritim;
- 8. Kepala Pusat Hidro-Oseanografi TNI AL;
- 9. Kepala Polisi Air dan Udara, Kepolisian Republik Indonesia;
- 10. Direktur Perkapalan dan Kepelautan, Kementerian Perhubungan.